

MAHASISWA DAN WISATAWAN DIIMBAU BEKALI SURAT SEHAT

Juli, Tantangan Yogya Menuju Normal Baru

YOGYA (KR) - Hingga saat ini Kota Yogya masih dalam tahap persiapan menuju kenormalan baru. Bahkan sepanjang bulan ini justru menjadi bulan tantangan bagi Kota Yogya terkait kesiapan menuju *new normal* tersebut.

Menurut Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Yogya Heroe Poerwadi, kehadiran wisatawan serta kembalinya mahasiswa dari kampung halaman menjadikan tantangan. "Mereka yang berasal dari luar daerah dan kembali datang ke sini justru tantangan untuk menguji kesiapan kita dalam menghadapi kenormalan baru," jelasnya, Senin (6/7).

Kembalinya mahasiswa ke Kota Yogya diprediksi akan bergelombang hingga akhir Juli. Sedangkan beberapa wisatawan pada akhir pekan terdeteksi juga sudah mulai datang. Jika kedatangan wisatawan serta kembalinya mahasiswa dari luar daerah tersebut tidak menimbulkan pengembangan kasus Covid-19, maka Kota Yogya berhasil melewati tantangan dengan baik. Hal

ini sekaligus menjadi tolok ukur kesiapan menuju *new normal*.

Oleh karena itu selama persiapan menuju kenormalan baru berupaya mengkondisikan semua tempat mampu menerapkan protokol dengan baik. Apalagi saat ini mulai banyak tempat ibadah, destinasi wisata serta akomodasi perhotelan yang mengajukan untuk diverifikasi dari sisi protokol yang diterapkannya. "Kami akan terus menyoal agar berbagai lokasi seminimal mungkin tidak ada paparan virus," tandas Heroe.

Dari sisi kawasan, Heroe mengaku merekomendasikan ada pembatasan jumlah pengunjung hingga 50 persen dari ketersediaan. Pembatasan itu bukan untuk mengurangi jumlah kunjungan melainkan menegakkan *physical distancing* atau jaga jarak yang aman

dari sisi pencegahan virus.

Di samping itu, mereka yang dari luar kota hendak menuju Yogya baik wisatawan maupun mahasiswa, diimbau membekali diri dengan surat sehat. Terutama yang berasal dari zona merah minimal hasil negatif *rapid test* bahkan uji PCR atau swab. "Harapan kita semua, mereka sebelum ke Yogya sudah dalam kondisi sehat. Ketika sampai sini pun harus mengikuti protokol yang sudah diterapkan," imbuhnya.

Kendati sudah ada pelonggaran pembatasan sosial serta dibukanya destinasi wisata, bukan berarti situasi sudah benar-benar normal. Landainya kasus Covid-19 di Kota Yogya juga bukan menjadi ukuran untuk seandainya bertindak seolah-olah tidak ada ancaman. Heroe kembali menegaskan, mayoritas kasus Korona disebabkan ada riwayat perjalanan dari luar daerah. Sehingga mau tidak mau, semua yang berada di Yogya harus disiplin menjalankan protokol.

(Dhi)-d

Penyembelihan Hewan Kurban Harus Kedepankan Protokol Kesehatan

YOGYA (KR) - Proses penyembelihan hewan kurban di masa pandemi Covid-19 harus mengedepankan protokol kesehatan. Untuk itu jika penyembelihan hewan kurban diputuskan dilaksanakan di area masjid, panitia kurban harus melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Salah satunya dengan mencegah terjadinya kerumunan massa dalam satu lokasi.

"Sebelum memutuskan menyembelih hewan kurban, takmir hendaknya mengkaji secara matang situasi dan kondisi terkini dengan memperhatikan fatwa ulama, ahli kesehatan, dan instruksi pemerintah," kata Direktur Pusat Kajian Halal Fakultas Peternakan UGM, Nanung Danar Dono SPT MP PhD di Yogyakarta, Senin (6/7).

Diungkapkan, guna membantu masyarakat Pusat Kajian Halal Fakultas Peternakan (Fapet) UGM menyusun rekomendasi penyembelihan hewan kurban saat pandemi Covid-19. Dalam rekomendasi tersebut didasarkan pada perspektif ilmu peternakan dan kesehatan umum. Tindakan itu dilakukan dengan harapan bisa melindungi masyarakat, khususnya panitia kurban dari risiko penularan Covid-19.

"Penerapan protokol kesehatan menjadi suatu keharusan saat penyembelihan hewan kurban. Konsekuensi dari itu apabila penyembelihan dilakukan di sekitar masjid, pengurus takmir perlu menunjuk tim khusus yang bertugas menyiapkan, mengawasi, dan memastikan seluruh panitia kurban dalam keadaan se-

hat. Pengurus takmir membatasi jumlah panitia kurban dan mendisinfeksi lokasi dan peralatan yang akan digunakan," jelas Nanung.

Guna memudahkan penanganan, panitia hendaknya menunjuk koordinator lapangan yang ditugaskan untuk memantau ketertiban seluruh panitia yang terlibat di lokasi penyembelihan. Misalnya, di lokasi penyembelihan, sebaiknya sudah disediakan hand sanitizer, air, sabun, masker dan penggunaan *face shield* lebih disarankan.

Seluruh panitia dan masyarakat yang terlibat diwajibkan mengikuti protokol kesehatan umum Covid-19 secara konsisten dan penuh kesadaran.

"Bagi seluruh panitia yang terlibat dalam penyembelihan harus mengenakan masker secara benar, menghindari kerumunan serta menjaga jarak antar-panitia 1,5 meter sampai 2 meter. Panitia hendaknya menyediakan air, sabun, hand sanitizer di tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau warga," tambahnya. (Ria)-d

PENANGANAN PANDEMI COVID-19

Gubernur DIY Dinilai Responsif

YOGYA (KR) - Gubernur DIY Sri Sultan HB X dinilai publik cukup responsif dalam penanganan pandemi Covid-19. Berdasar hasil survei yang dikeluarkan Indonesia Political Opinion (IPO), Sultan HB X berada pada urutan ketiga di antara nama kepala daerah (gubernur) yang menurut publik responsif dalam menangani pandemi Covid-19. "Survei langsung pada publik menjadi salah satu kebutuhan untuk mengukur persepsi publik atas pelayanan pemerintah, juga untuk mengetahui hasil kebijakan apakah mendapat sambutan penetratif atau tidak di masyarakat," kata Peneliti Utama IPO Catur Nugroho dalam keterangan resminya, Senin (6/7).

Menurutnya kebijakan kepala daerah terkait penanganan pandemi di wilayah masing-masing mendapatkan respons positif sebanyak 41,9 persen. Respons ini lebih baik daripada respons publik terhadap kebijakan Pemerintah Pusat

sebesar 32,5 persen.

Secara berurutan, kepala daerah yang mendapat penilaian responsif publik, yakni Anies Baswedan 62,6 persen, Ganjar Pranowo 60,1 persen, Sultan HB X 54,3 persen, Ridwan Kamil 53,0 persen dan I Wayan Koster 48,4 persen. Penilaian publik ini diukur dari beberapa aspek tertentu terkait penanganan pandemi Covid-19, yaitu aspek kepemimpinan, masalah ketenagakerjaan, bantuan sosial, keterbukaan informasi dan konsistensi regulasi.

Survei ini dilakukan IPO untuk mengali pendapat publik atas ide/gagasan dan implementasi penanganan wabah Covid-19 beserta dampak ekonomi, sosial, budaya dan politik oleh Pemerintah Pusat dan daerah. "Munculnya nama Anies Baswedan sebagai kepala daerah paling responsif sangat mungkin karena Jakarta menjadi episentrum utama wabah Covid-19. Publik menilai kebijakan PSBB yang

diberlakukan Pemprov DKI Jakarta tepat dalam mencegah penyebaran virus Korona," lanjut Catur Nugroho.

Survei opini publik ini juga melakukan penilaian terhadap kinerja presiden dan para menteri. Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja presiden di masa penanganan pandemi Covid-19 menunjukkan 63,2 persen publik puas dan 33,5 persen menyatakan tidak puas. Sedangkan Wakil Presiden RI dinilai publik tidak cukup responsif dalam penanganan pandemi dan hanya mendapatkan 39,1 persen kepuasan publik dan 42,5 persen menyatakan tidak puas.

Catur mengatakan, rendahnya penilaian publik terhadap kinerja Wakil Presiden menggambarkan belum seimbangannya pembagian kerja antara Presiden dengan Wakil Presiden. Sehingga publik menilai Wakil Presiden tidak cukup responsif dalam penanganan pandemi Covid-19. (Feb)-d

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan pasal 6 UU Hak Tanggungan No. 4 Th. 1996, PT. Bank Syariah Mandiri akan melakukan lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta, dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis melalui internet cara tertutup (closed bidding) pada aplikasi lelang melalui internet terhadap Jaminan debitor:

KUNTJORO, berupa:
Sebidang Tanah dan Bangunan SHGB No. 1106 seluas 1.000 M2, a.n. Kuntjoro terletak di Jl. Soragan, Ds. Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Provinsi DI Yogyakarta.
Nilai Limit Lelang : Rp. 10.321.000.000,00
Uang Jaminan Lelang : Rp. 2.064.200.000,00

WAKTU PELAKSANAAN LELANG:
Hari / Tanggal : Selasa / 21 Juli 2020
Batas Akhir Penawaran : Jam 10.00 waktu server aplikasi sesuai WIB
Alamat Domain : https://www.lelang.go.id
Tempat Lelang : KPKNL Yogyakarta, Jalan Kusumanegara Nomor 11 Yogyakarta
Pendaftaran Penawaran : Setelah batas akhir penawaran
Peserta lelang diharap menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain di atas.

- SYARAT DAN KETENTUAN LELANG:**
- Calon Peserta lelang dapat melihat obyek lelang di lokasi sejak diumumkan.
 - Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet, dengan penawaran secara closed bidding (penawaran secara tertutup) yang diakses pada alamat domain : www.lelang.go.id. Cara penggunaan dapat dilihat pada menu "Tata cara dan prosedur panduan penggunaan" pada domain tersebut.
 - Calon peserta lelang menandatangani diri pada Aplikasi Lelang Internet alamat domain : www.lelang.go.id, kemudian mengaktifkan akun dan merekam (scan) KTP, NPWP (ekstensi file *.jpg, *.png), dan nomor rekening atas nama sendiri. Peserta lelang yang bertindak sebagai kuasa badan usaha diwajibkan menggunakan surat kuasa notaris, akta pendirian perusahaan dan perubahannya, NPWP perusahaan dalam satu file.
 - Jaminan Penawaran Lelang:
 - Peserta lelang diwajibkan menyertakan uang jaminan dengan jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan dalam pengumuman lelang, disetorkan sekaligus (bukan dicicil) dan efektif diterima KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
 - Jaminan disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada calon peserta lelang, setelah berhasil melakukan pendaftaran, data identitas dinyatakan valid, dan memilih barang yang dilelang.
 - Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit. Penawaran lelang dapat diklik kembali-kali, sampai dengan batas waktu sebagaimana di atas.
 - Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang lelang wajib melunasi pembayaran pokok lelang ditambah bea lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang dilaksanakan, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang lelang dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara.
 - Obyek dilelang dalam kondisi apa adanya dengan segala konsekuensi biaya tertunggak atas obyek lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui kondisi obyek lelang. Peserta lelang tidak dapat menuntut ganti rugi apabila lelang dibatalkan karena sesuatu hal sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
 - Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. Bank Syariah Mandiri Area Collection & Recovery Yogyakarta, GRAH Mandiri Syariah Lt 3, Jl. Jend. Sudirman No. 42 Kotabaru, Gondokusuman Yogyakarta Telp. (0274) 585467 / 585 468 dan KPKNL Yogyakarta Jl. Kusumanegara No. 11 Yogyakarta Telp. (0274) 544 091).

Yogyakarta, 07 Juli 2020
mandiri syariah
PT BANK SYARIAH MANDIRI
AREA COLLECTION & RECOVERY YOGYAKARTA
KPKNL YOGYAKARTA

80 PERSEN BERKINERJA BURUK Pemekaran Daerah Hadapi Persoalan Besar



Suraji di kampus Universitas Utara Malaysia

KR - Istimewa

ADA persoalan besar daerah-daerah baru di Indonesia yang diberikan mandat untuk kebijakan pemekaran. Persoalannya yaitu setelah pemekaran berjalan maka yang terjadi birokrasi tidak bekerja dengan baik, kemudian terjadi konflik dalam penentuan jabatan dan kelembagaan. Selain itu keterbatasan anggaran, bahkan terdapat daerah yang dengan pemekaran masuk pada daerah miskin.

Demikian hasil riset yang disampaikan Suraji dalam mempertahankan disertasi di hadapan Tim Penguji dalam rangka peraih gelar PhD di Universitas Utara Malaysia (UUM), Senin (6/7).

Dalam Ujian Promosi Terbuka diadakan secara virtual itu Suraji menyampaikan disertasi dengan judul 'Regional Expansion Bureaucracy Arrangement in Indonesia'. Penelitiannya mengkaji tentang penataan birokrasi pemekaran di daerah di Indonesia yang juga membandingkan di beberapa negara seperti Malaysia dan Thailand. Menurut Tenaga Ahli Komisi X DPR RI itu, hasil awal dalam proses tahapan pemekaran sudah dilakukan, tetapi lebih kecenderungan kepentingan politik jangka pendek dari pada mengedepankan kemajuan daerah. Oleh karena itu Suraji merekomendasikan agar kebijakan pemekaran daerah di Indonesia perlu ditinjau kembali dan harus memperhatikan *grand design* baru seiring dengan era saat ini.

"Indonesia perlu undang-undang khusus tentang pemekaran yang mengatur jumlah wilayah, kabupaten/kota di Indonesia," ujar Suraji yang pernah menjadi Staf Ahli anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 2004-2019 Dapil Yogyakarta Hafidh Asrom.

Untuk provinsi/kabupaten/kota yang baru pemekaran, lanjut Suraji, harus dioptimalkan tata kelola pemerintahannya. Jika daerah tidak dapat memenuhi standar umum daerah, maka harus digabung dan atau mendapat pendampingan tahapan menjadi daerah baru.

Terkait dengan moratorium pemekaran daerah sejak pemerintahan Jokowi yang pertama, untuk tetap dipertahankan dan tidak mudah memberikan jeda daerah pemekaran. Sebab hal ini dapat memberatkan anggaran, daerah semakin terpuruk, penuh konflik dan hasilnya jauh dari tujuan pemekaran.

"Dari hasil penelitian, 80 persen daerah pemekaran ternyata berkinerja buruk. Hanya 20 persen yang bagus," tandas Suraji. Ia menyarankan agar Indonesia dapat belajar dari beberapa negara lain seperti Malaysia dan Thailand. Kedua negara mengambil kebijakan memaklumkan daerah dari sisi kesejahteraan, kemajuan dan efisiensi pemerintahan tanpa ada pemekaran walaupun tuntutan itu ada.

"Untuk pemekaran di Papua walau ada moratorium, namun ada kebijakan khusus Presiden untuk pemekaran, harusnya tidak mudah memberikan ijin, tetap pada upaya moratorium agar tidak memunculkan tuntutan daerah lain," tambahnya.

Dosen di berbagai perguruan tinggi itu menyampaikan data terbaru dari Kementerian Dalam Negeri mengenai perkembangan pemekaran daerah. Hasil pemekaran dan jumlah pada 1999-2014 jumlah provinsi sebanyak 34, 416 kabupaten dan 98 kota. Sehingga jumlah total terdapat 548 daerah. Sedangkan pada 2014-2020, jumlah permohonan pemekaran baru yaitu 10 provinsi, 290 kabupaten, dan 15 kota. Sehingga jumlah total 315 daerah yang mengajukan permohonan pemekaran.

"Sekarang dalam proses kajian di DPR RI, dan masyarakat di daerah yang mengajukan memaksa untuk dimekarkan," kata Suraji. (Chaidir)

Suraji, Santri dari Desa Raih PhD di Malaysia

SENIN, 6 Juli 2020, merupakan hari penting dan menjadi catatan sejarah berharga bagi Suraji. Putra asli kelahiran 'desa terpencil' di Grobogan, Jawa Tengah, itu berhasil meraih gelar tertinggi akademik 'PhD' (Doctor of Philosophy) dari Universitas Utara Malaysia (UUM). Dalam Sidang Promosi Terbuka yang dilakukan secara virtual dan dihadapan para penguji yaitu Profesor Dato' Nasrudin Mohammed PhD dari Universiti Teknologi MARA Malaysia, Prof. Mazlan Ismail PhD (UUM), Prof. Muhamad Ali Embi PhD (UUM), Prof. Zaheruddin Othman (UUM), Dr. Nor Sauyah Suhaimi (UUM) Suraji sukses mempertahankan disertasinya yang berjudul 'Regional Expansion Bureaucracy Arrangement in Indonesia' dengan nilai 'Memuaskan'.

"Alhamdulillah, akhirnya saya bisa meraih gelar PhD yang cukup lama saya perjuangkan. Ini merupakan anugerah dan berkah Allah," ujar Suraji ditemui usai mengikuti Ujian Promosi Terbuka PhD secara virtual, Senin (6/7).

Pria kelahiran 9 Oktober 1976 dari pasangan Haji Munawir (almahrum) dengan Hajah Munawaroh di Desa Curug Tegowanu Grobogan, mengaku banyak suka duk dalam menjalani perjuangan untuk menempuh gelar S3. Sebelum kuliah di Malaysia, sejak 2007-2016 Suraji pernah mengikuti Program Doktor di Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Padjadjaran, Universitas Pasundan dan Institut Teknologi Bandung. Kemudian tahun 2017 Suraji hijrah ke negeri Jiran untuk mengambil program PhD di Universitas Utara Malaysia dan akhirnya diraihnya gelar PhD yang merupakan 'hadiah' kebahagiaan bukan saja untuk dirinya, namun juga keluarga dan orangtuanya. Sebab sebagai seorang yang berasal dari desa yang berjarak 48 kilometer dari Kota Grobogan mampu meraih prestasi dan prestise yang membanggakan.

Suraji merupakan sosok yang terlihat enerjik, ulet, dan pantang menyerah. Sejak kecil ia terbiasa dalam mengenyam pendidikan. Anak keempat dari lima bersaudara ini tumbuh

di tengah keterbatasan fasilitas layaknya orang kampung. Pagi dan sore Suraji kecil lebih banyak melewati kehidupan dengan belajar. Pagi ia mengikuti pendidikan di Sekolah Dasar Curug dan sorenya dilanjutkan belajar di Madrasah Diniyyah. Di luar kegiatan belajar, Suraji rutin membantu neneknya (Manisah) memenuhi kebutuhan air bersih. "Saya harus membawa air bersih yang jaraknya 500 meter dari rumah. Pekerjaan menimba air di sumur sudah pekerjaan rutin," tutur Suraji.

Sejak umur 10 tahun dan masih duduk di sekolah dasar, Suraji sudah pisah dengan orangtuanya, karena kedua orangtuanya merantau ke Lampung Barat sehingga Suraji tinggal bersama neneknya. Setelah neneknya meninggal Suraji tinggal bersama kakaknya pertamanya (Sitimiyanti). Namun demikian masalah tersebut tidak menyurutkan dirinya untuk tetap menuntuti ilmu.

Setelah menyelesaikan sekolah dasarnya di Desa Curug Tegowanu Grobogan, ia kemudian melanjutkan pendidikan pesantren dan sekolah di Madrasah Tsanawiyah Futuhiyah 1 Mranggen Demak, Jawa Tengah, selama 3 tahun. Di sini lah jiwa santrinya digembleng. Kesantirannya semakin kental setelah pada tahun 1986 ia lulus dari MTs Futuhiyyah 1, kemudian hijrah ke Jawa Timur melanjutkan ke Pondok Pesantren Darussalam Modern Gontor Ponorogo Jawa Timur.

Pada tahun 1992, Suraji hijrah ke Kota Pelajar Yogyakarta, guna melanjutkan studi Madrasah Aliyah. Keinginannya untuk melanjutkan pendidikan formal dan pesantren yang berbasis Alquran, maka ia memilih studi di Pesantren Sunan Pandanaran Sleman sampai lulus.

Selama 9 tahun nyantri, Suraji mendapat banyak pengalaman dan pelajaran hidup yang berharga. Tak sia-sia menjadi santri lantaran ia dapat membaca Alquran dengan fasih, membaca kitab kuning klasik, dapat berbahasa Arab, bahasa Inggris, berpidato dan menguasai ilmu-ilmu agama. Tiga pesantren tempat Suraji Nyantri adalah pesantren Salaf-formal, Modern



Suraji bersama keluarga

KR - Chaidir

dan Tahfidzul Qur'an.

Selepas tamat madrasah aliyah di Sunan Pandanaran, dengan semangat menimba ilmu dan prinsip 'hidup adalah keyakinan dan perjuangan' Suraji melanjutkan studi S-1 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dan Universitas Ibnu Chaldun Jakarta. Tiga tahun kemudian, Suraji melanjutkan pendidikan S-2 di UGM Jurusan Magister Administrasi Publik dan lulus tahun 2006.

Dalam perjalanan hidupnya, ia dipercaya menjadi Staf Ahli Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pada 2004-2019, Penyelenggara Pemilu Kecamatan, menjadi Tim Seleksi (Timsel) Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Yogyakarta, Timsel Bawaslu Jawa Timur, hingga pendampingan di Kabupaten Teluk Bintuni Papua Barat kerja sama PB Migas-PSKK UGM. Pernah Aktif di Kepengurusan Sekolah Al Azhar Yogyakarta Bidang Mutu & Pengembangan, menjabat Direktur Eksekutif Matapena Institute, dan juga aktif dalam organisasi seperti aktivis anti korupsi, Forum Wacana Indonesia, Pergerakan Indonesia, KAHMI Pusat Jakarta, menjadi peserta Sekolah Kepemimpinan Nasional ICMU Pusat Jakarta, Sekjen Perkumpulan SAC Internasional, Pengurus Mahasiswa Pasca PPI UUM. Selain itu menjadi Pembina Persatuan Masyarakat Utara Malaysia, hingga menjadi konsultan politik Pilkada 2015, 2017, pemilu 2014 dan 2019.

Dalam dunia akademik tercatat pernah menjadi Dekan di FISIPOL Universitas Proklamasi 45 Jogjakarta (ajakan Cendekiawan Terkemuka Prof Dawam Rahardjo) selama 1 periode 2013-2015, mengajar di beberapa perguruan tinggi seperti Institut Pesantren Mathalili Falah Pati yang didirikan oleh Dr KH Sahal Mahfudh (Ketua Umum MUI dan Rois Aam Syariah PBNU). Selain itu Universitas Widya Mataram, UII, STPN, UIN, juga pernah mengajar di beberapa kampus di Jakarta seperti Universitas Nasional, Universitas Bakrie, dan diangkat menjadi Ketua Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Administrasi dan Manajemen Indonesia Jakarta,

Menjadi Anggota Dewan Pembina Universitas Binawan Jakarta, dan saat ini menjadi dosen tetap di Pasca Sarjana Program Magister Administrasi Publik Universitas Hangtuah Angkatan Laut Surabaya. Sejak Oktober 2019 Suraji diangkat menjadi Tenaga Ahli Komisi X DPR RI.

Di dalam dunia penelitian beberapa yang telah dilakukan Suraji di antaranya penelitian tentang Perbandingan Pemekaran Daerah di Indonesia-Malaysia (2020), Pengagihan Birokrasi Pemekaran Daerah di Indonesia (Tesis, 2020), Konflik Kepentingan dalam Penempatan Sumberdaya Aparatur Daerah Pemekaran (Disertasi 2016), Proses Politik Kebijakan Lingkungan Hidup di DPR RI Jakarta (Tesis, 2006).

Selama kuliah di Malaysia, Suraji mendapat hibah penelitian dari Universitas Utara Malaysia dan diminta menjadi asisten riset Supervisor untuk melakukan penelitian bersama, dan mengikuti konferensi internasional di beberapa negara seperti Rusia, Malaysia, Filipina dan Thailand dan beberapa daerah di Indonesia seperti Makassar, Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Malang, Jember dan Padang. Dalam publikasi jurnal telah mempublikasikan 13 papers yaitu 6 papers di Jurnal Scopus di antaranya: (1) International Journal of Innovation, Creativity and Change, www.ijicc.net Volume 7, Issue 5, 2019. (2) Utopia y Praxis Latinoamericana, ISSN: 1315-5216/ISSN-e: 2477-9555 Universidad del Zulia-Venezuela Venezuela, 2020. (3) DLSU Business and Economics Review, 0116-7111, 2020. (4) International Journal of Supply Chain Management, 2050-7399, 2020. (5) International Journal of Advance Science and Technology, eISSN 2005-4238, 2020. (6) International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Volume 23-Issue-4 ISSN: 1475-7192, 2019.

Sedangkan 7 papers di Jurnal Internasional terindeks. Menulis 7 buku dan menerjemahkan 5 buku akademik. Suraji juga saat ini menjadi Editor-in-chief Journal of American Academic Research. (Chaidir)



Suraji mengikuti ujian terbuka mempertahankan disertasi di UUM

KR - Istimewa